

BAB I

PENDAHULUAN

1. PERMASALAHAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

1.1.1. Sumbangan Pendidikan Terhadap Pembangunan

Faktor produksi terpenting dalam rangka pembangunan suatu bangsa adalah manusia, sebab manusia adalah sekaligus menjadi subjek dan objek pembangunan. Seperti dikatakan Prof. Friderich Harbison:

Sumber daya manusia ... akhirnya merupakan dasar kekayaan suatu bangsa. Modal dan sumber-sumber daya alam adalah faktor-faktor produksi yang pasif; manusia merupakan faktor produksi yang aktif, yang bisa mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber alam, membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi dan politik serta melaksanakan pembangunan nasional. Jelaslah bahwa suatu negara yang tidak bisa mengembangkan ketrampilan dan pengetahuan rakyatnya dan mememanfaatkannya secara efektif dalam ekonomi nasional, tidak akan bisa mengembangkan apa-apa lagi.¹

Mekanisma institusional yang utama untuk mengembangkan ketrampilan dan pengetahuan manusia adalah pendidikan. Pendidikan tidak hanya berusaha membekali pengetahuan dan ketrampilan yang memungkinkan orang bekerja sebagai kekuatan yang akan mengubah ekonomi dalam masyarakat, melainkan juga memberikan nilai-nilai, cita-cita, sikap serta aspirasi yang langsung atau tidak, berkaitan dengan kepentingan pembangunan suatu bangsa.

Secara tradisional, pendidikan dianggap hanya sebagai

¹ Aminuddin & Mursid (Penterj.), Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), pp. 433-44.

lembaga yang sekedar mengawetkan kebudayaan dan meneruskannya dari generasi ke generasi. Dalam anggapan ini terkandung bahaya, seolah-olah pendidikan berfungsi sekedar pengekalan struktur-struktur sosial yang berlaku bukan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan dan mendorong pertumbuhan. Namun sejak Perang Dunia II, ada perubahan penilaian tentang peranan pendidikan, sebab pendidikan diberi peranan yang sangat dinamis, ia diarahkan untuk mengubah dan mengembangkan pengetahuan, bukan untuk mengawetkannya: untuk menyebarkan kebudayaan kepada lingkungan sosial yang paling luas lagi malahan kepada masyarakat lain.²

Pergeseran penilaian tentang peranan pendidikan, didasarkan pada pertimbangan faedahnya bagi kemajuan bangsa. Dengan semakin majunya peradaban dan aspirasi manusia, semakin diperlukan orang-orang yang mempunyai pengetahuan dalam jumlah dan mutu yang semakin tinggi. Pengetahuan diterima dan dihayati sebagai kekayaan yang sangat berharga dan produktif, sebab pekerjaan produktif masa kini adalah pekerjaan yang didasarkan pada akal, bukan lagi pada tenaga. Karena itu pembentukan orang-orang yang terdidik dalam jumlah, mutu dan pemanfaatannya merupakan indikasi yang penting tentang potensi suatu negara. Upaya untuk mencerdaskan dan meningkatkan ketrampilan itu dicapai melalui pendidikan. Sehingga tidak mengherankan kalau ada

² Oteng Sutisna, Pendidikan Dan Pembangunan Tantangan Bagi Pembaruan Pendidikan (Bandung:Ganaco N.V., 1977),p.38.

yang mengatakan bahwa dari semua sumber daya: pendidikan adalah yang terpenting³, serta dilihat dari peranannya; maka pendidikan adalah kunci untuk segala-galanya.⁴

Pendidikan Tinggi adalah salah satu dari sub sistem pendidikan formal. Dikaitkan dengan pembangunan bangsa, pendidikan tinggi memainkan peranan tersendiri. Peranan itu nampak dari fungsinya yaitu sebagai lembaga untuk mendidik ilmuwan yang berwawasan luas dan tenaga-tenaga kerja profesional yang mampu dan trampil untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa.

Secara singkat peranan Pendidikan Tinggi itu termak-tub dalam Tri Dharma Pendidikan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melalui dharma pendidikan, pendidikan tinggi diharapkan dapat menempa dan menghasilkan tenaga kerja yang trampil yang mempunyai pengetahuan, di mana pikirannya kelak akan disumbangkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui dharma penelitian, pendidikan tinggi diharapkan mampu mengadakan inovasi yang berguna bagi pembangunan bangsa. Sementara melalui pengabdian masyarakat, pendidikan tinggi melalui civitas akademiknya dapat mengamalkan dan mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dimiliki untuk pembangunan bangsa.

Khusus untuk Indonesia, pemerintah telah membuat

³ E.F.Schumacher, Small Is Beautiful Economics As If People Mattered, (New York:Harper & Row, Inc., 1973), p.72.

⁴ Ibid., p. 73.

pedoman yang perlu dilaksanakan Pendidikan Tinggi. Hal itu terlihat dalam Tap . No. II/MPR/1983, yang berbunyi:

- (1) Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pusat kegiatan penelitian sesuai dengan kebutuhan pembangunan masa sekarang dan masa datang.
- (2) Mendidik mahasiswa agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.⁵

Melihat peranan dan fungsi perguruan tinggi yang demikian luas, mengisaratkan perlunya perhatian dan pemikiran yang besar untuk pengelolaan dan pembinaan yang terarah dan sistematis. Pengelolaan dan pembinaan yang demikian sangat diperlukan bagi perguruan tinggi, selain ditinjau dari peranan dan fungsinya, juga karena biaya studi di perguruan tinggi yang cukup mahal. Diakui bahwa menghitung berapa biaya seseorang studi di perguruan tinggi secara pasti sangat sulit, karena perbedaan waktu, tempat dan jenis studi, namun secara garis besar, Cina sesudah PD II telah mencoba menghitungnya, ternyata bahwa: menunjang satu orang di Universitas diperlukan hasil kerja 30 orang petani, jika seseorang kuliah selama 5 tahun, maka waktu ia menerima ijazahnya, dia telah menghabiskan 150 tahun kerja seorang petani.⁶

Terutama di Indonesia, upaya membuat perguruan

⁵ GBHN, TAP. No. II/MPR/1983, Susunan Kabinet Pembangunan (Semarang, Aneka Ilmu, CV., 1983), pp. 86-87.

⁶ E.F. Schumacher, op.cit., p. 195.

tinggi agar mampu melaksanakan peranan dan fungsinya telah banyak dilakukan oleh Pemerintah. Salah satu diantaranya adalah sebagaimana tertuang dalam S.K. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0124/U/1979, yang kemudian disempurnakan dengan S.K. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0211/U/1982, yang antara lain mengatur:

- (1) Pembaharuan jenjang dan jenis program di perguruan tinggi sehingga bersifat multistrata dengan jenis program yang diperkaya dan,
- (2) Penggunaan sistem kredit semester dengan pengaturan standard beban belajar dan masa belajar untuk setiap jenjang dan jenis program secara lebih baik dan terarah.⁷

Perubahan yang mengarah kemajuan senantiasa didambakan dan diusahakan oleh orang yang beradab. Hasilnya sudah nampak, baik dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kemudian mempengaruhi kehidupan sosial. Perubahan itu mempunyai dampak terhadap dua dimensi, yakni dimensi meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan dimensi kesenjangan, baik secara internasional maupun secara individual.

Dimensi kesenjangan internasional menampakkan diri dengan semakin jauhnya perbedaan kemajuan antara negara maju dengan negara-negara sedang berkembang. Sedang dimensi kesenjangan individual menampakkan diri dalam perbedaan kemajuan dan kesejahteraan yang menyolok yang dinikmati oleh orang yang "mampu" dan yang "kurang mampu".

⁷ Pedoman Pelaksanaan Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Di Indonesia, Buku IV: Penyelenggaraan Pendidikan Dan Penilaian Dalam Sistem Kredit Semester (Jakarta:Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, 1980), p.1.

Kesenjangan yang semakin menyolok tersebut kalau dibiarkan berlangsung terus, akan merugikan bagi negara, terutama negara-negara sedang berkembang. Sebab selain memperlemah posisi di dunia internasional juga dapat menimbulkan keresahan dan ketegangan dalam negeri.

Upaya mencapai kemajuan adalah melalui pembangunan di segala bidang, terutama dalam bidang pendidikan, ternyata kalau diperhatikan dalam kenyataan praktis: pendidikan semakin mendapat tempat yang penting, bahkan dapat disebut tempat yang sangat strategis dalam proses pembangunan dan pembinaan ketahanan negara-negara tersebut.⁸

Peranan strategis dari pendidikan itu terjadi karena pendidikan, tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan orang tapi yang terutama adalah memasok tenaga yang diperlukan dalam proses pembangunan, baik dalam arti jumlah maupun mutu.

Peranan strategis dari pendidikan terhadap pembangunan akan semakin jelas jika ditinjau dari segi ekonomi, sebab ternyata dari hasil-hasil penelitian ada beberapa sumbangan konkret dari pendidikan terhadap ekonomi, yang nampak dari beberapa pendekatan, yakni;

- (1) Pendekatan residual yakni dengan menghitung sumbangan dari modal, input tenaga kerja dan sumber-sumber fisik kepada pertumbuhan produksi dan apapun yang tertinggal sebagai sisa (residu) dianggap berasal dari faktor

⁸ Winarno Surakhmad, "Problematik Pembaruan Pendidikan Negara-Negara Sedang Berkembang Dewasa ini", Prisma, No. 2 (Februari, 1981), 8.

manusia. Sejumlah studi menunjukkan bahwa sebagian besar pertumbuhan produksi di negara-negara industri selama separuh abad terakhir, dianggap disebabkan oleh faktor manusia. Solow memperkirakan hanya 10 % dari pertumbuhan ekonomi bisa diterangkan berasal dari pertumbuhan penduduk dan sumber fisik, sedang sisa yang 90 % dianggap disebabkan oleh faktor residual.

- (2) Pendekatan korelasi yaitu pendekatan yang menggunakan perbandingan antar negara yakni dengan mencari hubungan antara tingkat pertumbuhan pendidikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Harbison dan Myers menunjukkan, ada korelasi yang tinggi pada semua tingkat pendidikan.
- (3) Pendekatan besar keuntungan atau rate of return approach yakni pendekatan yang menganggap bahwa penghasilan orang yang berpendidikan berasal dari investasi dalam pendidikan. Konsekuensi-konsekuensi ekonomi dari pendidikan dipelajari dengan mempertentangkan penghasilan orang-orang yang berpendidikan " lebih " dan yang berpendidikan " kurang ". Perbedaan dalam penghasilan itu diukur melalui analisa cost-benefit, dinyatakan sebagai persentase keuntungan investasi dalam pendidikan untuk perseorangan maupun masyarakat secara keseluruhan. Ternyata tanpa kecuali, bahwa dari sudut produktivitas, keuntungan pendidikan sama tingginya dan bahkan lebih tinggi dengan keuntungan investasi di bidang lainnya.⁹

⁹ Bandingkan dengan : Oteng Sutisna, op.cit., pp.54-56.

Khusus bagi Indonesia, peranan strategik dari pendidikan telah diakui sejak dulu. Pengakuan itu nampak dalam Pembukaan UUD 45 yang mengatakan bahwa salah satu tujuan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dalam GBHN dijabarkan lebih lanjut, yaitu:

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.¹⁰

1.1.2. Perguruan Tinggi dan Pembangunan

Perguruan Tinggi sebagai jenjang terakhir sistem pendidikan formal mempunyai peranan tersendiri, yang membuatnya perlu ditangani dan diperhatikan secara khusus. Perguruan Tinggi, selain bertujuan memanusiakan manusia, juga berperan penentu bagi pengembangan dan pembangunan bangsa di kemudian hari. Adapun peranan perguruan tinggi menurut T.K.Oommen adalah: (1) Promoting tradition and modernity, (2) Promoting Nationalism and Humanism, (3) Supporting and opposing The State, (4) Promoting people orientation and undertaking elite training and (5) Promoting stability and change.¹¹

Memajukan/mengembangkan tradisi dan modernitas berpangkal dari asumsi bahwa sebagian dari tradisi dan

¹⁰ GBHN, TAP. No. II/MPR/1983, Susunan Kabinet Pembangunan, op.cit., p. 83

¹¹ T.K.Oommen, The Vision and Reality of University, The Asian Context: A Cretical Review Of The Vision and Reality Of University In Society, (Bangkok-Thailand:1985), pp. 11-13.

modernitas merupakan assets atau modal, sehingga menjadi peranan perguruan tinggi adalah mempertahankan tradisi dan modernitas tertentu secara selektip.

Mengembangkan nasionalisme dan humanisme berkaitan dengan pentingnya kedua hal itu bagi kehidupan suatu negara. Nasionalisme diartikan sebagai ideologi, sedang humanisme sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang sifatnya jangka panjang. Karena kedua hal di atas sangat penting, membuat perguruan tinggi wajib untuk mengembangkannya.

Mendukung dan berhadapan dengan negara, berkaitan dengan kenyataan bahwa perguruan tinggi khususnya di Asia dibiayai dan kemungkinan diawasi oleh negara. Namun jika negara berorientasi kepada manusia serta jika sifat-sifat masyarakat kondusif untuk dikembangkan, perguruan tinggi harus mengembangkannya, paling tidak membantu membentuk pandangan tentang dan hubungan masyarakat dan negara.

Mengembangkan orientasi pada orang dan mengutamakan latihan orang-orang elite, berpangkal pada pemahaman bahwa membangun suatu negara diperlukan orang-orang pilihan yaitu mereka yang memangku posisi penting dalam negara. Menghasilkan orang-orang demikian merupakan tugas perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus mampu melatih orang-orang pilihan yang mempunyai nilai-nilai yang memungkinkan pengembangan sosial bukan sekedar mobilitas vertikal untuk pribadi.

Mengembangkan stabilitas dan perubahan, berkaitan dengan pandangan bahwa perguruan tinggi merupakan institusi atau alat untuk stabilitas dan sebagai agen pembaharuan.

Maksudnya perguruan tinggi harus melawan kecenderungan fundamentalisme, ketidaktepatan dan irrasionalitas, serta menghilangkan perubahan sosial yang cepat yang tidak diinginkan.

Dari keterangan di atas nampak betapa besar peranan perguruan tinggi dalam pembangunan suatu bangsa. Perguruan tinggi selain sebagai agen pembaharu yaitu sebagai wahana untuk menemukan dan mendesiminasikan penemuan-penemuan baru juga berfungsi mengkader dan menghasilkan calon pemimpin bangsa.

Kesadaran tentang pentingnya peranan perguruan tinggi, membawa masalah dan tantangan tersendiri bagi pengelolanya. Harapan agar dapat menghasilkan sarjana-sarjana yang mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan harapan masyarakat, menuntut perguruan tinggi agar mengadakan usaha-usaha pembaharuan. Pembaharuan itu selain menyangkut titik orientasi juga dalam proses belajar mengajar.

Perlunya perubahan titik orientasi dikaitkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, akibat pembangunan dan meningkatnya aspirasi masyarakat. Pembangunan menimbulkan perubahan dan perubahan itu menimbulkan aspirasi baru serta membutuhkan tenaga dalam jumlah dan mutu yang semakin meningkat.

Perguruan tinggi sebagai sarana pendukung pembangunan, kalau mau taat asas atau konsekuen dengan misinya, harus tanggap terhadap perubahan. Sebagai wahana pencipta manusia-manusia pembangun, perguruan tinggi tidak boleh puas dengan apa yang telah ada. Dia harus mampu mengikuti

irama perubahan malah harus dapat mendahuluinya.

Sebagai dampak perubahan, tuntutan akan tenaga ahli dan trampil semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Perubahan tuntutan itu menjadi tantangan bagi perguruan tinggi. Darinya diharapkan, selain mampu meningkatkan jumlah lulusan juga harus mampu menghasilkan tenaga dengan kualitas yang sesuai dengan derap perubahan. Tuntutan itu dari tahun ke tahun berubah, mengisaratkan agar perguruan tinggi juga perlu merubah atau berbenah diri, tidak lagi hanya berorientasi kualitas melainkan berorientasi kuantitas dan kualitas yang mengalami diversifikasi.

Tantangan di atas diperkuat lagi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa pendidikan adalah suatu proyek yang memerlukan biaya besar. Masyarakat menuntut agar pengelola pendidikan mempertanggungjawabkan program dan proses pendidikan. Yang diminta dipertanggungjawabkan adalah: program pendidikan dengan dana yang dipergunakan.¹²

Memperhatikan harapan dan tantangan di atas, perguruan tinggi dalam praktek sehari-hari perlu mengubah titik orientasi. Tidak hanya berorientasi pada jumlah dan mutu lulusan, melainkan perlu mengkaitkan biaya dengan penyelenggaraan pendidikan. Singkatnya, dari perguruan tinggi dituntut efisiensi dan efektivitas pendidikan.

Perguruan tinggi sebagai wahana pencipta kader

¹² Mohammad Fakry Gaffar, Tantangan dan Arah Baru Bagi Manajemen LPTK, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Ke 30 IKIP Bandung (Bandung:1984), p. 1.

pemimpin bangsa, membawa problema tersendiri. Kepada mahasiswa didikannya, perlu dibekali selain ilmu dan ketrampilan juga perlu dibekali sikap-sikap atau nilai-nilai sebagai calon pemimpin. Sikap itu adalah sikap berani atau keberanian. Keberanian itu terdiri dari beberapa unsur dan dimensi. Secara konseptual, di dalam keberanian ada unsur-unsur seperti: potensi, daya, kemauan, kehendak, kesediaan dan kesiapan untuk bergerak dan memilih sesuatu, dengan dimulai berlatih, mencoba, bertindak dan membiasakan.¹³ Sedang konsep keberanian terdiri dari dimensi-dimensi:

- (1) Keberanian ragawi atau keberanian badaniah, yaitu kemauan, kesediaan, kesiapan, dan kemampuan orang dengan anggota badannya untuk bergerak mengerjakan sesuatu pekerjaan... Keberanian segi ini dapat diperhatikan dari gerakan anggota badan memikul tugas, mengerjakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan fungsinya.
- (2) Keberanian sosial atau keberanian komunikasi, yaitu kemauan, kehendak, kesediaan, kesiapan dan kemampuan seseorang untuk bersikap terbuka, suka mendekat atau berhubungan dengan orang lain. Ada kesediaan berlatih, mencoba dan akhirnya membiasakan diri berkomunikasi dua arah, berdiskusi dan saling memberi keterangan dan penjelasan yang dianggap perlu, juga saling memberi kritik atau saran, walau putusan tetap sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.
- (3) Keberanian moral, yaitu kemauan, kesediaan, kesiapan, dan kemampuan seseorang dalam menghayati, memilih, memelihara, mengikat diri, dan mempertahankan diri dengan nilai-nilai moral yang telah jadi keyakinannya dan sebagai way of live. Ini berkenaan dengan seluruh tata nilai yang menyangkut benar-salah, baik-buruk, adil-zalim dsb. yang bersemayam

¹³ Achmad Sanusi, Masalah Mutu Pendidikan dan Kebudayaan (Ungkapan lain sesuai dengan tuntutan UUD 45 & Tap MPR), Forum Sosial Budaya, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Nusantara (Bandung: Uninus, Desember, 1984), pp. 19-20.

di dalam hati sanubari. Orang bilang: berani karena benar... Keberanian moral sering juga disebut keberanian perseptif, yang pada hakekatnya dilihat dari sudut kesediaan dan kemampuan rasa serta akal budi dalam menghayati serta mempertahankan nilai-nilai baik-buruk.

- (4) Keberanian kreatif, yaitu kemauan, kesediaan, kesiapan, dan kemampuan orang untuk berlatih, mencoba, dan membiasakan diri menaruh perhatian sungguh, mengolah informasi, menyusun dan membentuk gagasan, dan akhirnya memproduksi sesuatu dengan arti, makna, dan kegunaan baru yang lebih bermutu dari apa yang ada sebelumnya.
- (5) Keberanian imani, yaitu kemauan, kesediaan, dan kesiapan untuk berlatih, mencoba, dan membiasakan diri percaya adanya Yang Maha Ghaib, Yang Maha Esa, Yang Maha Pencipta, Yang Maha Kuasa, dst. Dialah Allah swt. Yang Maha Benar, Yang Maha Adil, dst.¹⁴

Supaya perguruan tinggi mampu menghasilkan manusia-manusia pembangunan, mampu bekerja secara efektif dan efisien serta mampu menghasilkan calon pemimpin yang mempunyai keberanian dengan segala dimensinya, menuntut perguruan tinggi mengadakan perubahan yang bersifat inovatif-konstruktif. Perubahan itu menyangkut dalam segala aspeknya atau dalam sistem pendidikannya, baik kurikulum, proses belajar-mengajar serta tatacara penilaian.

Perubahan dalam kurikulum bukan diartikan hanya sekedar merubah matakuliah yang disajikan, melainkan lebih dalam dari itu. Perubahan yang dituntut tidak cukup hanya bersifat: meliorisme—semacam usaha reformasi tambal sulam¹⁵, melainkan perlu perubahan konseptual yang

¹⁴ Ibid., pp. 20-23.

¹⁵ Winarno Surakhmad, "Ilmu Kependidikan Untuk Pembangunan Sebuah Kebutuhan Strategik Dunia Ketiga", Prisma, 2 (Februari, 1986), 4.

memungkinkan dapat berkembang secara fundamental. Perubahan itu tidak hanya perubahan sewaktu-waktu, darurat dan mencoba-coba, melainkan perlu didisain untuk tujuan nasional, yang memungkinkan perguruan tinggi sebagai bagian yang bersatu dan bersenyawa dengan proses pembangunan.

Dipihak lain aspirasi dan kebutuhan masyarakat selalu berubah. Agar lulusan perguruan tinggi dapat selalu siap kerja, mengisaratkan agar perguruan tinggi selalu mengantisipasi aspirasi dan kebutuhan tersebut. Kemauan dan kemampuan mengantisipasi itu diwujudkan dalam kesediaan meninjau kurikulum yang dipakai. Peninjauan kurikulum bukan diartikan untuk selalu mengganti sebagaimana sering terjadi atau sekedar memangkas kurikulum disana-sini: sehingga kurikulum itu tidak pernah dapat bertahan cukup lama untuk memantapkan diri¹⁶, melainkan perlu didisain secara konseptual dan didasari pemikiran yang mendasar, sehingga memampukannya untuk bertahan lama. Bukan diartikan supaya kurikulum tidak berubah. Perubahan tetap dapat dan selalu diinginkan, namun perubahan itu bukan perubahan total melainkan perubahan dalam aspek matakuliah yang disajikan. Yang diinginkan adalah kurikulum yang dapat bertahan untuk jangka lama atau bersifat tetap, namun dimungkinkan untuk memasukkan peluang-peluang baru. Suatu kurikulum yang kokoh namun bersifat lentur (fleksibel), sehingga tidak perlu diganti setiap ada keinginan dan harapan baru, itulah yang diharapkan.

¹⁶Ibid., 6.

Agar harapan dan keinginan di atas dapat terpenuhi, kurikulum yang selama ini yang sifatnya kaku dan statis perlu diganti dengan suatu kurikulum yang sifatnya dinamik dan lentur. Rancang bangun yang sesuai dengan sifat terakhir adalah Sistem Kredit Semester atau disingkat SKS. Penggunaan SKS di perguruan tinggi, selain dapat mengantisipasi harapan dan aspirasi masyarakat, juga memiliki keunggulan lain. Keunggulan itu, di samping soal efisiensi juga memungkinkan mendidik mahasiswa untuk memiliki keberanian dengan segala dimensinya. Keberanian itu timbul karena kepada mahasiswa dengan sistem ini dituntut untuk mau dan mampu memutuskan sendiri, baik menyangkut jumlah matakuliah atau kredit yang akan diambil.

1.1.3. SKS dan Perguruan Tinggi di Indonesia

SKS berbeda dengan sistem yang dianut dan diterapkan selama ini, yakni sistem tingkat/blok. Dalam sistem tingkat, mahasiswa hanya diperbolehkan mengikuti kuliah pada jenjang berikutnya manakala persyaratan minimum telah dipenuhi dari jenjang sebelumnya. Jika persyaratan itu tidak terpenuhi, mahasiswa biasanya dianggap atau dinyatakan "gugur", dalam arti tinggal tingkat, dan semua atau sebagian matakuliah harus diulang, meskipun sebelumnya telah dinyatakan lulus.

Ditinjau hanya dari aspek penentuan kenaikan tingkat saja sistem tingkat atau berjenjang telah menampakkan kelemahan. Selain merupakan pemborosan dari segi biaya, waktu dan tenaga, juga membuat perguruan tinggi kurang mampu memasok tenaga yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam SKS yaitu sistem tanpa tingkat, keberhasilan mahasiswa pada dasarnya ditandai oleh makna yang terkandung dalam kata Kredit dan Semester. Pada sistem ini, pada hakekatnya diakui bahwa penyelesaian suatu unit proses belajar dapat dihargai secara kuantitatif maupun kualitatif, selama masa tertentu. Kredit yang diperoleh dapat ditabung untuk secara kumulatif pada suatu saat dapat dipakai sebagai tanda telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan suatu program.

Perbedaan lain yang perlu disoroti adalah dalam hal penentuan matakuliah yang diambil mahasiswa. Pada sistem tingkat/blok, kepada seluruh mahasiswa yang berada dalam satu tingkat, diwajibkan mengambil sejumlah matakuliah yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan dalam kemampuan intelektual mereka. Cara ini kurang baik, sebab dengan penyamarataan akan memberatkan mahasiswa yang kemampuan intelektualnya kurang, serta menghambat mahasiswa yang kemampuan intelektualnya tinggi.

Lain halnya dengan SKS. Beban kredit atau matakuliah yang diambil pada suatu semester, disesuaikan dengan keinginan, kemampuan intelektual dan finansialnya. Dengan cara ini diharapkan tidak ada mahasiswa yang terganggu. Mahasiswa yang kemampuan intelektualnya kurang atau ada faktor pembatas, dapat mengambil beban kredit yang lebih sedikit, sedang mahasiswa yang kemampuan intelektualnya tinggi, dapat mengambil beban kredit dalam jumlah yang lebih banyak. Cara ini, selain mampu menunjukkan unsur keadilan juga memungkinkan perguruan tinggi, lebih mampu

memasok tenaga yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Jika dikaji dari konsep dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam penyelenggaraan SKS, dan pola pelaksanaannya, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan SKS dapat dicapai beberapa hal:

1. Untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu sesingkat-singkatnya.
2. Untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
3. Untuk memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan " Input " dan " Output " jamak dapat dilaksanakan.
4. Untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
5. Untuk memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
6. Untuk memungkinkan pengalihan (" transfer ") kredit antara jurusan, antara bagian, atau antara Fakultas dalam suatu perguruan tinggi.
7. Untuk memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi yang satu ke perguruan tinggi yang lain, atau dari satu bagian ke bagian lain dalam sesuatu perguruan tinggi tertentu.¹⁷

Salah satu sifat manusia adalah kesukaan dan kemampuan untuk berpikir. Berpikir dipakai baik dalam menyelesaikan tugas atau masalah, maupun menafsirkan suatu konsep atau ketentuan. Jika suatu konsep atau ketentuan tidak diikuti dengan pedoman praktis, dapat mengakibatkan tafsir yang berbeda atau malah mungkin saling bertentangan. Menghindari perbedaan tafsir terhadap SK Menteri

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kredit Untuk Perguruan Tinggi (Salatiga: PPSP-UKSW, 1980), pp. 1-2.

No. 0124/U/1979, kemudian dilanjutkan dengan SK Menteri No. 039/U/1980, yang mengukuhkan Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan (PPSPTK). Untuk melaksanakan PPSPTK telah dikeluarkan pedoman pelaksanaannya oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yaitu:

Pedoman I membicarakan masalah-masalah secara umum yang menyangkut rasional pembaharuan, pembaharuan insitucional, pelayanan dan pembinaan lanjutan terhadap tenaga kependidikan, serta mekanisme pengembangan sistem.

Pedoman II membicarakan secara lebih luas masalah kurikulum inti pendidikan tenaga kependidikan.

Pedoman III mengupas soal pengalaman lapangan.

Pedoman IV akan membicarakan masalah penyelenggaraan pendidikan dan masalah penilaian dalam sistem kredit semester.¹⁸

Pencetusan dan penerapan perkuliahan dan penilaian dengan SKS pada perguruan tinggi di Indonesia: walaupun sangat mirip dengan yang diterapkan di Amerika Serikat¹⁹, namun masih merupakan suatu inovasi: walaupun masih dalam tingkatan reproduktif dan regeneratif²⁰, sebab SKS yang diterapkan di Indonesia sudah diolah lebih lanjut sehingga mendapat tambahan yang bernilai. Diakatakan inovasi tahap regeneratif/reproduktif sebab S1, S2 dan S3 yang ada di Indonesia dan di Amerika Serikat mempunyai perbedaan. Selain dalam hal jumlah kredit yang harus diperoleh tiap jenjang, juga berbeda dalam derajat penguasaan materi.

¹⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Pedoman Pelaksanaan Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia Buku IV, op.cit., p. 1.

¹⁹ Karangan, Kompas (Jakarta), 3 Juli 1985, p. 1.

²⁰ Achmad Sanusi, op.cit., p. 7.

Gelar Bacheloriat Amerika adalah gelar pertama di Universitas dan penyandang gelar ini tidak diharapkan telah memiliki ilmu yang tuntas di bidangnya. Dia masih merupakan seorang generalis yang pernah mempelajari banyak ilmu, tapi tidak mendalami satupun. Di Indonesia, jiwa SKS memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk memilih dan menentukan bakatnya sendiri, namun pada umumnya mahasiswa masih dikotak-kotakkan secara dini, sebab pada saat mahasiswa diterima pada perguruan tinggi, mereka harus memilih bukan hanya fakultas tapi juga jurusan yang hendak dimasuki.

Apapun kelemahan yang masih terdapat pada SKS yang saat ini diterapkan di Indonesia, namun ide yang dikandung dalam SKS masih mempunyai keunggulan yaitu memungkinkan lembaga menaikkan produktivitas, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, memungkinkan penerapan demokrasi pendidikan serta memungkinkan untuk menghasilkan tenaga yang mempunyai keberanian. Yang perlu ditata dalam waktu singkat adalah penyelenggaranya, sebab disitulah penghalang terbesar yang sering ditemui. Dari pengalaman ternyata: guru-guru, baik di Universitas maupun di sekolah menengah, umumnya bersifat konservatif²¹, sehingga sangat sukar mengubah sikap mereka. Sebagian dosen di perguruan tinggi enggan melepaskan diri dari kaca mata akademik yang telah lama dipakai dan dikenalnya. Mereka biasanya

²¹Awad Bahasoan dan Naswil Idris (Penyunting), C.E. Beeby, Assessment Of Indonesian Education A Guide in Planning (Wellington: New Zealand Council for Educational Research, 1979), p. 41.

menolak usaha-usaha pembaharuan: sumber utama penolakan adalah vested interest yang sudah mapan dan untuk itu mereka akan berjuang untuk mempertahankan status quo atau keadaan tetap²², sehingga diterapkannya cara baru, sering secara apriori ditolak tanpa lebih dulu mendalami secara seksama.

Diakui bahwa dalam pelaksanaan/penerapan SKS ditemui kendala-kendala, terutama kendala sikap dan keinginan para pelaksana. Sebab penerapan SKS menuntut perubahan pola pikir dan pola pandang seluruh warga perguruan tinggi, yang kemudian diwujudkan dalam perubahan persepsi, strategi penanganan sampai pada praktek-praktek di tingkat pelaksanaan sehari-hari. Mengingat pembaharuan ini telah menjadi kebijakan pemerintah dan sudah dipandang sebagai kebutuhan yang mutlak untuk meningkatkan peranan dan mutu perguruan tinggi, pelaksanaannya tidak boleh ditunda-tunda: pemerintah telah membuat suatu target agar perubahan itu segera dimulai dan diharapkan sudah mencapai sasaran pada tahun 1983/1984²³, sebab kalau tuntutan besar itu diserahkan secara bebas pada para pelakunya, dapat diramalkan, perubahan yang dimaksud akan sukar terlaksana dalam waktu yang pendek.

²² Kenneth W. Thompson, Barbara R. Fogel, and Helen E. Danner (edit.), Higher Education and Social Change Promising Experiments in Developing Countries (New York: Praeger Inc., 1976), I, Reports, p. 10.

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Pelaksanaan Pola pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan, Buku IV, op.cit., p. 82.

Universitas Kristen Satya Wacana (selanjutnya disebut UKSW) di Salatiga, salah satu perguruan tinggi yang berstatus swasta di Indonesia, sejak tahun 1974 sebenarnya telah menerapkan SKS, hanya saja pedoman yang dipakai belum merupakan kesatuan yang terpadu atau integratif. Dengan akibat, sering terjadi tafsir yang berbeda, pelaksanaan yang tidak seragam, sehingga dapat merugikan lembaga maupun mahasiswa. Dari hasil pengalaman selama sembilan tahun dan didorong oleh harapan pemerintah, kemudian dibuat suatu ketentuan yang terpadu yaitu dengan dikeluarkannya Ketentuan Rektor No. 48/Kep./Rek./1983, yang mengatur tentang SKS tertanggal 2 Juli 1983.

Penerapan SKS di UKSW adalah wujud komitmen dalam mengikuti ketentuan tentang pendidikan tinggi yang bersifat nasional serta upaya untuk menunjukkan partisipasi dalam pembangunan nasional, sebab dalam GBHN dikatakan:

Perguruan swasta perlu ditingkatkan mutu, peranan, dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dan makin dikembangkan pertumbuhannya berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap, dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas perguruan yang bersangkutan.²⁴

Dari kutipan di atas nampak bahwa kehadiran perguruan swasta diakui dan malah dinyatakan bahwa: perguruan tinggi swasta adalah mitra dari lembaga Perguruan Tinggi Negeri²⁵, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

²⁴ GBHN., op.cit., p. 86.

²⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Pidato Pengarahan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Pada Rapat Kerja Rektor Universitas/Institut Negeri Dan Kakanwil Departemen P dan K Seluruh Indonesia (Jakarta: 26-28 Februari 1980), p. 7.

Pengikutsertaan seluruh potensi lembaga swasta dalam pembinaan pendidikan tinggi merupakan kebijakan yang akan menjembatani tercapainya tujuan pendidikan dalam situasi terbatasnya sumber yang tersedia. Diakui lembaga pendidikan tinggi swasta, dalam hal investasi, keadaan dan kemampuan pada umumnya " lebih kurang " dibanding dengan pendidikan tinggi negeri, namun agar eksistensinya dapat dipertahankan, dalam kenyataan: pendidikan tinggi swasta lebih peka terhadap pengembangan program studi sesuai dengan permintaan yang berkembang di masyarakat²⁶, karena itu peranan PTS sangat penting dalam pembinaan pendidikan nasional.

Walaupun penerapan SKS di UKSW telah berlangsung lama, malahan mendahului ketentuan formal yang mengaturnya yaitu SK Menteri No. 0124/U/1979, bukan berarti dalam praktek sudah berlangsung sempurna. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman, banyak ditemukan kekurangan dan masalah, baik yang menyangkut produktivitas lembaga, penentuan dan pengambilan beban kredit semester oleh mahasiswa, keluhan tentang kekurangan ruang dan sebagainya.

Timbulnya masalah-masalah di atas dapat dipahami, jika disadari bahwa SKS adalah suatu sistem. Dalam suatu sistem, jika ada perubahan dalam salah satu elemennya akan mempengaruhi elemen-elemen lainnya secara keseluruhan. Sehingga perubahan sistem pendidikan hanya dapat bermakna bila diikuti dengan perubahan-perubahan dari semua

²⁶ Ibid., p. 8.

elemen yang berkaitan dengannya. Mengingat sistem pendidikan mewadahi kegiatan berbagai unsur, maka perilaku unsur-unsur itu harus juga berubah kompatibel dengan perubahan yang ada.

Reformasi sistem pendidikan dari sistem Blok ke SKS, bertitik tolak dari pengakuan perlunya menyesuaikan lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pembangunan. Sehingga yang ingin dirubah adalah " tujuan " penyelenggaraan perguruan tinggi agar dapat menghadapi isyu-isyu pokok dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Isyu-isyu itu adalah : produktivitas, kuantitas, kualitas, relevansi, pemerataan kesempatan belajar (ekuiti), masa depan dan dinamika sistem pendidikan tinggi²⁷. Dengan menempatkan lulusan atau hasil pendidikan tinggi sebagai " tujuan " penyelenggaraan perguruan tinggi, maka adanya keinginan merubah atau memperbaiki " tujuan " ini, sekaligus menuntut perubahan dalam dua hal yaitu: sarana pendidikan yang diperlukan untuk menghasilkan tujuan tersebut dan cara penyelenggaraan pendidikan yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut.²⁸

Menurut pola pikir atau analisis sistem demikian juga SKS, keinginan untuk merubah tujuan mempunyai konsekuensi bahwa sarana dan cara harus juga dirubah. Perubahan

²⁷ Laporan Rektor Dan Pembantu Rektor Universitas Kristen Satya Wacana (Salatiga: 30 November 1985), p. 9.

²⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Rancangan Naskah Petunjuk Untuk Tenaga Pengajar Dalam Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Atas Dasar Kredit Semester (Jakarta: 1981), p. 1.

itu terjadi karena asumsi bahwa usaha menghasilkan sesuatu yang optimal atau serasi, menuntut kombinasi antara " tujuan-sarana-cara ". Jika salah satu diantaranya berubah, optimasi atau keserasian akan terganggu. Untuk memperoleh atau mengembalikan pada tingkat optimasi yang baru, harus dicari kombinasi " tujuan-sarana-cara " yang baru pula. Dari keterangan di atas nampak bahwa reformasi sistem penyelenggaraan pendidikan dari sistem lama ke SKS merupakan reformasi menyeluruh. Reformasi itu bukan hanya sekedar perubahan dalam menghitung beban studi mahasiswa, bukan hanya sekedar perubahan dalam pengadministrasian nilai ujian atau perubahan parsial lainnya.

UKSW Salatiga, merupakan lembaga perguruan tinggi yang telah menerapkan SKS dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa, sehingga walau penerapan SKS merupakan beban yang besar terutama bagi PTS: bagi UKSW secara umum bukan merupakan masalah lagi.²⁹ Jika ditinjau dari tuntutan penerapan SKS, memang bukan masalah, namun dalam praktek-praktek penyelenggaraannya ditemukan masalah-masalah. Masalah itu dapat berupa kekurangan ruang, kekurangan dosen yang berwenang secara akademik, kekurangan dalam memprogramkan kegiatan akademik terstruktur dan mandiri. Masalah-masalah inilah yang mendorong kami untuk mengadakan penelitian tentang penyelenggaraan SKS di UKSW.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di UKSW, sebagian besar sebagai akibat dari kenyataan bahwa UKSW

²⁹ Laporan Rektor Dan Pembantu-Pembantu Rektor UKSW, op.cit., p.15.

telah berdiri sebelum SKS diterapkan. Komitmen untuk merubah tujuan penyelenggaraan perguruan tinggi mudah dilakukan namun dalam aras sarana dan cara, persoalannya menjadi berlainan.

Mengingat bahwa penentu utama keberhasilan penyelenggaraan SKS sebagian tergantung dari sarana dan cara yang dipergunakan, mengisaratkan bahwa sarana dan cara perlu dan harus dicari kombinasi yang dapat memungkinkan optimasi atau keserasian baru. Justru disinilah letak timbulnya permasalahan. Sarana pendidikan yang ada, baik sarana dosen, sarana fisik, sarana administratif, sebagian besar telah ada sebelum SKS diterapkan. Sarana fisik dan administratif yang ada dirancang dan dibangun pada saat dan untuk penyelenggaraan sistem lama. Khusus untuk sebagian besar tenaga dosen, karena dibina dan diarahkan untuk penyelenggaraan sistem lama, dalam diri mereka telah berpolakara-cara lama yang sulit diubah supaya sesuai dengan tuntutan sistem baru atau SKS.

Menseraskan sarana pendidikan dengan SKS, banyak cara yang dapat ditempuh. Dapat dengan pembaharuan secara total atau dapat juga dengan penyesuaian ulang. Karena sarana itu sebagian besar telah tersedia sebelumnya, tindakan yang diambil adalah cara yang kedua. Tindakan penyesuaian untuk sarana fisik tidak terlalu sukar dilakukan. Yang paling sulit adalah penataan ulang sarana dosen. Dosen yang sudah ada terutama yang lebih senior, khususnya yang kurang terlibat dalam struktur administratif perguruan tinggi, kurang merasa terlibat dalam perubahan,

dalam diri mereka telah terbentuk persepsi bahwa: kebebasan memilih cara pengajaran itu sepenuhnya terletak di tangan tenaga pengajar itu sendiri.³⁰

Penerapan SKS pada perguruan tinggi sudah merupakan tuntutan, malah suatu keharusan, karena itu tindakan pembinaan ulang harus dilakukan. Tindakan demikian telah dan sedang dilaksanakan. Dosen-dosen yang ada, baik senior maupun junior diberi penjelasan dan harapan melalui beragam media dan cara, baik melalui selebaran, penataran-lokakarya maupun aktivitas lainnya. Namun sampai seberapa pengaruhnya terhadap dan di dalam tindakan praktek, masih perlu dipertanyakan dan hingga saat ini belum ada evaluasi yang secara khusus diadakan. Agar optimasi yang optimal dapat tercapai, perlu diadakan monitoring atau pemantauan, dan untuk tujuan itulah penelitian ini juga dilakukan.

Penelitian ini berusaha mengadakan penilaian tentang penyelenggaraan SKS, terutama dalam prosesnya. Proses yang diteliti adalah apa yang terjadi pada tingkat lembaga yaitu UKSW Salatiga melalui aktivitas praktis yang dilakukan oleh sarana pendidikan yang ada. Penelitian penerapan SKS perlu dilakukan, sebab dengan penelitian ini akan diperoleh gambaran yang dapat dipakai sebagai balikan atau feedback, dalam rangka menata sarana pendidikan agar penerapan SKS di UKSW dapat semakin disempurnakan.

³⁰Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, op.cit.,p.3.

Model penelitian yang dilakukan adalah bersifat evaluatif dan mengambil suatu kasus di UKSW Salatiga, dengan asumsi SKS telah dilaksanakan. Dari hasil penelitian ini akan diperoleh informasi yang berguna sebagai balikan bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama para pengambil keputusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan dan pengembangan lembaga.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Masalah yang hendak diteliti berhubungan dengan proses penyelenggaraan SKS di UKSW Salatiga. Beberapa aktivitas yang perlu dilakukan oleh UKSW agar penyelenggaraan SKS dapat berlangsung baik adalah ; (1) Penyusunan Buku Pedoman penyelenggaraan pendidikan berdasarkan SKS, (2) Penyediaan sarana yang diperlukan agar dapat mencapai optimasi atau keserasian dengan penyelenggaraan SKS dan (3) Mengubah atau membentuk persepsi para pelaku agar komit dan kompatibel dalam penyelenggaraan SKS.

Kegiatan-kegiatan di atas saling berkaitan dan semua kegiatan itu dianggap penting agar proses penyelenggaraan SKS dalam tingkat lembaga dapat berjalan lancar.

Penyusunan Buku Pedoman dianggap perlu, di samping berguna sebagai pegangan bertindak bagi setiap pelaku, juga perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan ketentuan Pemerintah, supaya UKSW dapat turut serta menanggulangi isyu-isyu pokok yang dihadapi pendidikan tinggi dewasa ini, yakni, produktivitas, kualitas, kuantitas, relevansi, pemerataan kesempatan pendidikan (ekuiti), masa depan dan dinamika sistem pendidikan tinggi.

Buku pedoman penyelenggaraan SKS untuk UKSW telah ada, yang diberi nama ; Pedoman Program Pendidikan Sistem Kredit Semester Universitas Kristen Satya Wacana atau sering dinamakan Buku Biru, berdasarkan SK Rektor UKSW No.48/Kep./Rek./1983, tanggal 2 Juni 1983. Isi, pengertian dan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya, didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diperlakukan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan di bidang perguruan tinggi, seperti SK Menteri No.0124/U/79, No.0211/U/1982 dan sebagainya, namun didalamnya dimasukkan hasil-hasil pemikiran UKSW sesuai dengan kondisi dan aspirasi yang ada.

Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan tinggi di Indonesia, UKSW harus terlibat dalam dan turut berpartisipasi menghadapi isu-isu pokok pendidikan tinggi di Indonesia dewasa ini. Dalam kenyataan isu-isu pokok itu sudah merupakan bagian dari permasalahan pendidikan di UKSW. Sudah dicanangkan bahwa penanganan isu-isu itu selain sebagai usaha dalam rangka tahapan stabilisasi, juga merupakan tahapan kelayakan kemampuan UKSW untuk merumuskan peranannya dalam menunjang dan mengisi tahap lepas landas pembangunan nasional Indonesia.

Tersedianya buku pedoman berkaitan erat dengan pengadaan sarana, sebab ketentuan yang terdapat dalam buku pedoman dapat dijadikan sebagai pangkal-tolak dan pembanding pengadaan atau penyediaan sarana. Perlu dikaji agar sarana yang tersedia senantiasa mencukupi, baik secara jumlah maupun kualitas, supaya optimasi dapat tercapai.

Telaah terhadap persepsi pelaku-pelaku dalam SKS,

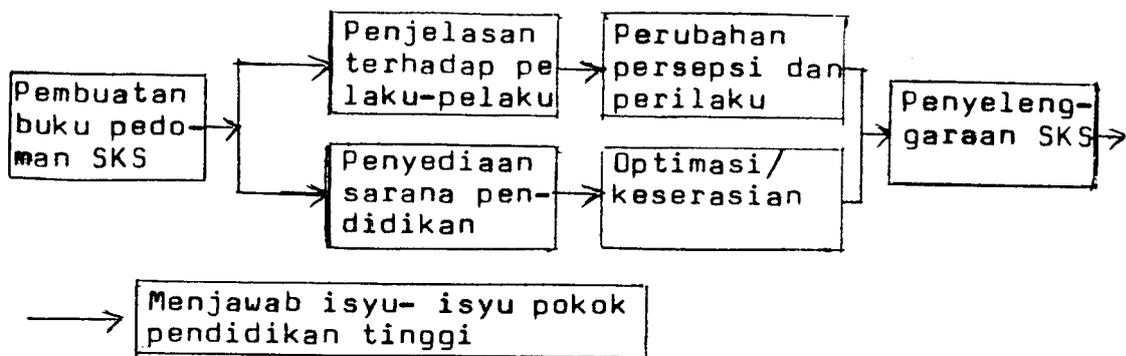
juga tidak kalah pentingnya. Sukses tidaknya penyelenggaraan SKS, sebagian besar tergantung pada pelaku-pelakunya. Pelaku-pelaku itu meliputi dosen, tenaga administratif dan yang tidak kalah pentingnya adalah para mahasiswa.

Perubahan persepsi dosen mutlak dilakukan, sebab penyelenggaraan SKS hanya mungkin berhasil jika dosen memahami perubahan dalam citra peranannya. Perubahan citra itu kemudian perlu diikuti dengan perubahan pola perilaku yang dinampakkan dalam proses mengajarnya.

Perubahan persepsi para mahasiswa merupakan dimensi lain yang mutlak dilakukan. Kalau dalam sistem lama mahasiswa hanya di pandang sebagai objek atau bahan baku yang perlu diolah, dalam SKS mereka memegang peranan aktif, mulai dari masalah admisi, penyusunan program studi, pengambilan dan pembatalan matakuliah, penentuan waktu studi baik tatap muka, terstruktur dan mandiri.

Persepsi tenaga administratif tentang tugasnya tidak kalah pentingnya untuk diubah. Dalam SKS tugas mereka berubah dan bertambah dengan jumlah yang banyak. Mulai dari penyusunan program pendidikan, penjadwalan, laporan hasil evaluasi sampai pada penyimpanan data.

Permasalahan penelitian ini diangkat dari kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKS, sedang kegiatan itu dapat di lihat dalam pola berikut;



Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKS melalui komponen-komponen yang terlibat didalamnya, pada tahun akademik 1984/1985. Namun yang dievaluasi secara khusus hanyalah terbatas pada beberapa aspek yang mungkin dievaluasi dari dan sesuai dengan data yang diperoleh. Penelitian ini dibatasi pada aspek;

- 1) Kesiapan UKSW dalam menyelenggarakan SKS, yang akan di lihat dari segi kelayakan sarana pendidikan yang tersedia agar SKS dapat diselenggarakan dengan baik.
- 2) Koherensi/kesepadanan antara yang diharapkan pemerintah dengan praktek-praktek di UKSW dalam penyelenggaraan SKS, yang akan dievaluasi dari perubahan perilaku pelaku-pelaku dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- 3) Produktivitas Lembaga sesudah diterapkannya SKS.

Untuk jelasnya maka masalah-masalah di atas dirumuskan menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut,

- 1) Bagaimanakah kondisi kelayakan sarana pendidikan yang disediakan oleh UKSW dalam penyelenggaraan SKS pada tahun Akademik 1984/1985.
- 2) Bagaimanakah koherensi atau kesepadanan penyelenggaraan

SKS di UKSW oleh para pelaku-pelaku diperhadapkan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau UKSW sendiri.

- 3) Bagaimanakah kondisi produktivitas lembaga UKSW, khususnya pada tahun akademik 1984/1985 dibandingkan dengan kondisi pada tahun akademik 1983/1984.

2. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua tujuan yang hendak dicapai yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

2.1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran umum mengenai proses penyelenggaraan SKS oleh para pelakunya pada tingkat lembaga UKSW yang nampak dalam praktek-praktek kerja, dalam rangka perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan SKS di UKSW Salatiga.

2.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini berusaha untuk mengevaluasi proses penyelenggaraan SKS di UKSW dengan menfokuskan perhatian pada tiga aspek penting yaitu,

- 1) Kelayakan sarana pendidikan yang tersedia dalam penyelenggaraan SKS pada tahun akademik 1984/1985.
- 2) Koherensi/kesepadanan penyelenggaraan SKS di UKSW diperhadapkan dengan ketentuan yang berlaku, baik dari pemerintah maupun dari UKSW sendiri berkaitan dengan penyelenggaraan SKS.
- 3) Produktivitas lembaga tahun akademik 1984/1985.

3. Pentingnya Penelitian

Penelitian ini bersifat evaluatif dan sasarannya

adalah proses penyelenggaraan SKS di UKSW Salatiga. Penyelenggaraan SKS ini penting untuk diteliti karena berkaitan dengan upaya pengelolaan dan pembinaan pendidikan tinggi, khusus UKSW Salatiga. Dengan mengadakan studi evaluatif, memungkinkan untuk memperoleh informasi yang dapat dipakai sebagai balikan bagi pimpinan UKSW dalam meninjau atau membuat modifikasi terhadap penyelenggaraan SKS agar lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara khusus, masalah ini penting diteliti karena ditinjau dari aspek-aspek berikut,

3.1. Aspek praktis operasional

Ditinjau dari aspek ini, masalah yang diteliti dapat memberikan gambaran tentang kondisi pelaksanaan SKS di UKSW oleh para pelakunya. Melalui gambaran tersebut diharapkan dapat diperoleh keterangan-keterangan, yang kemudian dipakai sebagai balikan untuk mencari penyelesaian yang lebih baik, dalam rangka meningkatkan mutu proses penyelenggaraannya. Kemudian diharapkan penyelenggaraan SKS di UKSW dapat ditingkatkan atau dikembangkan lebih lanjut.

3.2. Aspek teoritik

Terhadap aspek ini, dari penelitian ini diharapkan untuk dapat dipakai menguji keberlakuan teori-teori yang diperoleh dalam Administrasi Pendidikan pada umumnya dan Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan pada khususnya.

Aspek praktis operasional dan aspek teoritik dapat di pandang sebagai aspek penting yang perlu dikaji dan dianalisis secara ilmiah, agar penyelenggaraan SKS di

UKSW Salatiga dapat ditingkatkan lebih lanjut, dalam rangka mewujudkan partisipasi UKSW untuk menanggapi isu-isu pokok pendidikan tinggi yang ada dewasa ini, yaitu produktivitas, kuantitas, kualitas, relevansi, ekuiti dan masa depan serta dinamika sistem pendidikan tinggi.

Pentingnya penelitian ini berkaitan erat pula dengan alasan mengapa masalah ini diteliti yakni,

- 1) Masalah ini menarik perhatian dan minat penulis untuk diteliti.
- 2) Masalah ini dapat diteliti, karena SKS telah diselenggarakan di UKSW Salatiga sejak tahun 1974, sehingga dimungkinkan untuk mengadakan studi evaluatif.
- 3) Masalah yang diteliti mempunyai kaitan yang erat dengan latarbelakang pengetahuan dan bidang studi yang di pilih yaitu Administrasi Pendidikan pada umumnya dan Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan pada khususnya.
- 4) Penelitian ini dapat di dukung oleh sumber-sumber yang tersedia.